

**PARTISIPASI POLITIK PADA PENDUDUK SIRKULER DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
(Studi di Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto Kabupaten
Wonogiri)¹**

Oleh:

Santi Lusiani, Winarno & Moh. Muchtarom²

ABSTRACT

This study used a qualitative approach with descriptive form of research. Data sources are used consisted of: informants, places, events and documents. Sampling technique that be used is purposive sampling. Techniques of data collection through observation, interviews, and documentation. Validity of the data by using triangulation of data and triangulation methods. While, the analysis is using interactive techniques of analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that: (1) Political participations of the circular citizen in Bulukerto village in Central Java's governor election in 2013 only on the vote, discussion and socializing. The use of suffrage only 30.09% of the total circular population in the Bulukerto village. In the socialization activity only 1 of 18 informants and discussion only 4 of 18 informants. (2) Factors that affect the participation of circular residents in Bulukerto villages influenced by factors within the individual that is because a) the mindset of people who do not believe in government, b) figure candidates for governor and lieutenant governor are less popular among the people. While the external factors because a) a job factors, the majority of circular citizen chose not to leave the job rather than voting, b) other factors are the polling places is so far from the city circular population mobility, c) in administrative, circular populations are not enrolled in Daftar Pemilihan Tetap (DPT), and also they did not get an invitation.

Kata kunci : partisipasi politik, pemilihan gubernur

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah, baik ditingkat propinsi, kabupaten/kota dan desa. Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta menjamin prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.

Dalam pemilihan kepala pemerintahan daerah baik propinsi, kabupaten maupun kota dipilih secara demokratis yaitu rakyat dapat memilih pemimpin secara langsung dalam pemilihan daerah yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi bahwa "Gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Pemilihan kepala daerah juga dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian ke delapan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam pasal 56 (1) UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah

dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam mensukseskan pemilihan gubernur untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat maka masyarakat berhak memengaruhi proses keputusan politik dan berpartisipasi aktif dalam keputusan politik dengan menggunakan hak pilihnya.

Pada dasarnya semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban di berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dalam pasal 27 ayat (1) ini mengandung arti bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan termasuk dalam bidang politik. Selain itu hak warga negara diatur dalam pasal 28 menyatakan " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang". Hak-hak warga negara diatur dalam pasal 28 termasuk hak-hak politik warga negara yaitu untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang baik (*good citizen*) dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban, salah satunya dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Penduduk permanen maupun penduduk sirkuler mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin sesuai aspirasinya dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur serta mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) dalam kehidupan politik.

Banyaknya penduduk sirkuler yang tidak menggunakan hak pilih menunjukkan bahwa penduduk sirkuler belum mencerminkan *good citizen* dengan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kelurahan Bulukerto, Penduduk sirkuler yang mempunyai hak pilih di Kelurahan Bulukerto pada tahun 2008 berjumlah 786 jiwa. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2008 penggunaan hak pilih penduduk sirkuler berjumlah 196 jiwa atau 25% sehingga penduduk sirkuler yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 590 jiwa atau

berkisar 75% dari jumlah penduduk sirkuler. Penduduk sirkuler lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama yakni menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di Kelurahan Bulukerto dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di Kelurahan Bulukerto. Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memaksimalkan fungsinya dalam pelaksanaan pemilihan gubernur pada periode berikutnya serta untuk penduduk sirkuler agar lebih meningkatkan partisipasi dalam pemilihan gubernur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta. Penulis berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan, observasi lapangan serta

studi dokumen yang berhubungan dengan obyek, dalam hal ini ditekankan pada partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013.

Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel dengan memilih beberapa perangkat Kelurahan Bulukerto, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bulukerto, Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonogiri dan beberapa penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto yang sekiranya dapat dipercaya dan dapat memberikan info yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti yaitu tentang partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa perangkat Kelurahan Bulukerto, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bulukerto, Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonogiri dan beberapa penduduk sirkuler di

Kelurahan Bulukerto. Observasi dilakukan dengan mengamati partisipasi politik penduduk sirkuler dalam kegiatan-kegiatan politik pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini meliputi keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, rekapitulasi ketidakhadiran pemilih pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, data laporan profil Desa/Kelurahan Bulukerto tahun 2013, laporan data potensi dinamis Kelurahan Bulukerto tahun 2013.

Guna memperoleh validitas data digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam

pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah beberapa perangkat Kelurahan Bulukerto, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bulukerto, Kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonogiri dan beberapa penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto, dokumen terkait, tempat, dan peristiwa.

Teknik analisis data dalam bahasan ini menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah yaitu: tahap penyusunan proposal dan ijin penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data awal, tahap analisis data akhir dan tahap penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, dimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang politik. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat secara sukarela, tanpa

pengaruh dari siapapun dapat mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye dan sosialisasi.

Di Kelurahan Bulukerto banyak masyarakat yang melakukan mobilitas penduduk sirkuler, berdasarkan laporan data potensi dinamis tahun 2013 berjumlah 1090 jiwa atau 23,57% dari jumlah penduduk di Kelurahan Bulukerto 4624 jiwa. Penduduk yang melakukan mobilitas penduduk sirkuler yaitu penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun dan telah memiliki hak pilih. Hal ini menyebabkan sedikitnya partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 yaitu hanya 30,09 %. Pemilihan gubernur memberikan ruang bagi penduduk sirkuler maupun penduduk permanen untuk menggunakan hak pilih sesuai aspirasinya. Hal ini relevan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Surbakti (1992:140), bahwa partisipasi politik ialah "Keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya, partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik". Keaktifan penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto dalam memberikan suara maupun kegiatan-kegiatan politik lainnya tentu harus didorong oleh sikap antusias yang tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi penduduk dalam kegiatan politik sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik penduduk sirkuler terhadap pemilihan kepala daerah untuk menentukan pemimpin yang berkualitas. Hal ini senada dengan pendapat Miriam Budiardjo bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) Gatara dan Said (2007:91).

Adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada tatanan politik yang stabil. Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kelurahan yang banyak penduduknya melakukan mobilitas penduduk sirkuler yaitu 23,57 % dari jumlah penduduk di Kelurahan Bulukerto. Mayoritas penduduk yang melakukan mobilitas penduduk sirkuler, penduduk yang telah memiliki hak pilih sehingga hal

tersebut menghambat penduduk sirkuler untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 karena jauhnya jarak antara kota tujuan mobilitas penduduk sirkuler dan faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena ada beberapa penduduk sirkuler yang tidak libur.

Pemilihan gubernur Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 merupakan sarana bagi penduduk Jawa Tengah untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto tampaknya kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Hal ini dapat terlihat dalam ketidakikutsertaan penduduk sirkuler dalam kegiatan-kegiatan dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013.

Banyak penduduk sirkuler yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pemilihan gubernur seperti sosialisasi, kampanye, diskusi, ikut menjadi panitia maupun kelompok kepentingan dan penggunaan hak pilih. Penduduk sirkuler lebih memilih pasif bahkan tidak menggunakan hak pilihnya. Dari hasil rekapitulasi ketidakhadiran pemilih pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 762 pemilih dari

jumlah penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto berjumlah 1090 pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan suara di Kelurahan Bulukerto, karena yang tidak menggunakan hak pilih 69,91% sedangkan penduduk sirkuler yang menggunakan hak pilih tidak ada setengah dari total penduduk sirkuler yaitu hanya 30,09 %. Dalam kegiatan-kegiatan politik lainnya seperti sosialisasi, kampanye, diskusi, ikut menjadi panitia maupun kelompok kepentingan penduduk sirkuler kurang antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Rush dan Althof (2003:23) bahwa "Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik".

Penduduk merupakan tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan penduduk dalam negara demokrasi adalah partisipasi penduduk dalam pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih pemimpin, dalam penggunaan hak pilih penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto menurut Surbakti (1992:142) merupakan partisipasi aktif, "Dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan

dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan". Hal ini tidak relevan dengan pendapat Roth dan Wilson bahwa pemilih merupakan penonton (*onlookers*) sedangkan calon pemimpin yang disebut aktivis atau partisipasi aktif, "Penonton (*onlookers*) merupakan orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, *pe-lobby*, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik" (Budiardjo, 2009:372).

Di Kelurahan Bulukerto tidak diadakan kampanye dari calon-calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Penduduk hanya mengetahui figur calon-calon pasangan gubernur dan wakil gubernur melalui pamflet maupun baliho-baliho yang di pasang di tempat umum. Bahkan sebagian besar penduduk sirkuler pada hari pemungutan suara, tidak mengetahui calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini tidak senada dengan teori perilaku pemilih yang di paparkan Firmanzah (2007: 112), "Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut".

Dalam partisipasi politik ada tingkatan-tingkatan kegiatan, dimana masyarakat dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut mulai dari sosialisasi, kampanye, mengikuti kepentingan kelompok atau tim sukses, diskusi, menjadi panitia dalam pemilihan dan menggunakan hak pilih untuk memengaruhi hasil keputusan. Di Kelurahan Bulukerto partisipasi penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah merupakan partisipasi konvensional yaitu penduduk sirkuler dapat berpartisipasi dalam pemberian suara dengan menggunakan hak pilih selain itu penduduk sirkuler juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Hal ini sesuai dengan teori Almond yang dikutip oleh Said & Gatra (2007:98) bahwa "Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern".

Faktanya dalam kegiatan pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013, partisipasi penduduk sirkuler dalam kegiatan sosialisasi hanya 1 dari 18 informan dan diskusi hanya 4 dari 18 informan sedangkan penggunaan hak pilih hanya 30,09% dari jumlah penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto. Dalam pembagian partisipasi politik

menurut Almond, penggunaan hak pilih penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 tergolong dalam partisipasi konvensional yaitu bentuk partisipasi politik yang normal tanpa adanya kekerasan yang terbagi dalam beberapa bentuk partisipasi, namun di Kelurahan Bulukerto penduduk sirkuler hanya berpartisipasi dalam beberapa kegiatan partisipasi yaitu pemberian suara dan diskusi politik. Penduduk sirkuler tidak mengikuti semua kegiatan politik seperti yang dipaparkan oleh Almond yang menyebutkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi konvensional terbagi dalam 5 bentuk sehingga penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto tidak berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Untuk kegiatan kampanye, di Kelurahan Bulukerto memang tidak diadakan kampanye hanya pemasangan pamflet-pamflet di tempat umum. Berikut bentuk-bentuk partisipasi konvensional menurut Almond yang dikutip oleh Said & Gatra (2007:98) "Pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi".

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto hanya pada sosialisasi, diskusi, dan penggunaan hak pilih. Prosentase partisipasi politik penduduk sirkuler tergolong sedikit, pada penggunaan hak pilih hanya 30,09% dari jumlah penduduk sirkuler yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013.

Partisipasi politik penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan luar individu, di jelaskan sebagai berikut:

a. Faktor dari dalam diri individu

Faktor yang berasal dari diri individu yaitu karena pola pikir penduduk sirkuler yang tidak percaya pada pemerintah serta figur calon gubernur dan wakil gubernur yang kurang populer dikalangan penduduk sehingga banyak penduduk sirkuler yang tidak minat dalam pemilihan gubernur karena mereka bingung untuk menentukan pilihan pasangan calon sehingga penduduk sirkuler memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

b. Faktor dari luar individu

Faktor yang memengaruhi penduduk sirkuler tidak dapat menggunakan hak pilih yaitu karena pekerjaan, mayoritas penduduk sirkuler memilih tidak menggunakan hak pilih daripada meninggalkan pekerjaannya. Hal ini relevan dengan

pendapat Surbakti (1992:145), bahwa:

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkritnya, pilihan seseorang dalam pilkada dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat umum tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Faktor lain yang memengaruhi yaitu jauhnya jarak kota mobilitas penduduk sirkuler dengan tempat pemungutan suara sehingga penduduk sirkuler tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk menggunakan hak pilihnya, penduduk sirkuler harus mengeluarkan biaya untuk pulang ke rumah. Hal ini relevan dengan pendapat Surbakti (1992:146), "Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi".

Selain kedua faktor tersebut, secara administratif ada beberapa penduduk sirkuler yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap dan tidak mendapatkan undangan meskipun telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang yaitu sudah berumur 17 tahun sudah/pernah menikah, sehingga penduduk sirkuler tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

dalam pasal 68 bahwa “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

Dari bunyi pasal di atas mempunyai makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara namun untuk menggunakan hak pilihnya, penduduk sirkuler harus terdaftar dalam daftar pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pasal 69 ayat 1 bahwa “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”.

Sedikit penduduk sirkuler yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, di Kelurahan Bulukerto sedikit penduduk sirkuler yang pulang karena kesadaran penduduk sirkuler untuk menggunakan hak pilihnya, banyaknya penduduk sirkuler yang pulang saat pemilihan gubernur Jawa Tengah karena ada kepentingan pribadi seperti acara keluarga. Penduduk sirkuler yang tidak menggunakan hak pilihnya karena menurunnya tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintahan sehingga mereka bersikap acuh terhadap pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013. Hal ini sesuai dengan teori tentang faktor yang

memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik yang dikemukakan Surbakti (1992:144), “Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)”.

Menurunnya tingkat kepercayaan penduduk sirkuler terhadap pemerintahan mengakibatkan pola pikir penduduk sirkuler yang beranggapan bahwa kegiatan pemilihan gubernur ini merupakan kegiatan yang sia-sia dan tidak berdampak pada penduduk sirkuler. Hal ini senada dengan teori Rosenberg yang dikutip oleh Sastroadmodjo (1995: 75) mengenai alasan apatis seseorang dalam persoalan politik bahwa “ Individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan kontrol politik”.

Dalam hasil temuan peneliti bahwa salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi politik penduduk yang berasal dari luar individu yaitu karena jauhnya tujuan mobilitas sirkuler sehingga penduduk sirkuler mengalami kendala dalam penggunaan hak pilih. Semakin meningkatnya penduduk sirkuler berdampak pada rendahnya partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur. Hal ini

tidak relevan dengan teori Weiner (yang dikutip oleh Gatara dan Said, 2007:89) salah satu penyebab (rangsangan) timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu “Adanya modernisasi di semua bidang yang menyebabkan masyarakat semakin banyak berpartisipasi dalam politik”.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi politik penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto berasal dari dalam diri individu dan faktor dari luar individu. Mobilitas penduduk sirkuler merupakan kendala bagi penduduk sirkuler untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan gubernur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian di lapangan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto hanya pada pemberian suara, diskusi dan sosialisasi. Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013 tidak mencapai setengah dari jumlah penduduk sirkuler yaitu pada penggunaan hak pilihnya 30,09% dari jumlah penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto atau

penggunaan hak pilih penduduk sirkuler berjumlah 328 pemilih dari keseluruhan jumlah penduduk sirkuler berjumlah 1090 pemilih. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang sebagian besar penduduk sirkuler di Kelurahan Bulukerto kurang berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2013, dalam kegiatan sosialisasi hanya 1 dari 18 informan dan diskusi hanya 4 dari 18 informan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik penduduk sirkuler dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013
 - a. Faktor dari dalam diri individu
Faktor yang berasal dari diri individu yaitu karena pola pikir penduduk sirkuler yang tidak percaya pada pemerintah serta figur calon gubernur dan wakil gubernur yang kurang populer di kalangan masyarakat sehingga banyak penduduk sirkuler yang tidak berminat dalam pemilihan gubernur karena mereka bingung untuk menentukan pilihan pasangan calon sehingga penduduk sirkuler memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
 - b. Faktor dari luar individu
Faktor yang memengaruhi penduduk sirkuler tidak dapat menggunakan hak pilih yaitu karena pekerjaan, mayoritas penduduk sirkuler

memilih untuk tidak meninggalkan pekerjaannya daripada menggunakan hak pilihnya. Serta jauhnya jarak kota mobilitas penduduk sirkuler dengan tempat pemungutan suara sehingga penduduk sirkuler harus pulang ke rumah untuk menggunakan hak pilihnya namun penduduk sirkuler lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena banyaknya biaya yang di keluarkan untuk mudik. Selain itu faktor dari luar individu yaitu penduduk sirkuler secara administratif tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan tidak mendapatkan undangan sehingga penduduk sirkuler tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah harus lebih memperhatikan penduduk sirkuler karena jumlahnya yang tidak sedikit dan berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Tengah.
 - b. Pemerintah hendaknya membuat Undang-Undang yang dapat mengakomodir keberadaan penduduk sirkuler sehingga dapat menjamin hak-hak penduduk sirkuler untuk dapat menggunakan hak pilih

dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - a. Komisi Pemilihan Umum hendaknya lebih aktif menghimbau penduduk sirkuler untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah.
 - b. Komisi Pemilihan Umum hendaknya lebih memperhatikan sosialisasi dan kampanye agar dapat menyeluruh sampai pada lapisan bawah sehingga dapat meningkatkan minat dan antusias penduduk sirkuler dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah.
3. Bagi Penduduk Sirkuler
 - a. Penduduk sirkuler hendaknya lebih berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah yaitu dengan mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Tengah.
 - b. Penduduk sirkuler hendaknya membangkitkan minat dan kesadaran sebagai warga negara untuk ikut andil dalam mensukseskan pemilihan gubernur Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatara, A.A. S. & Said M, D. (2007). *Sosiologi Politik (Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian)*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rush, M. & Althoff, P. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang No. 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

JURNAL EDUCITIZEN